

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sektor unggulan atau sektor kunci perekonomian di Indonesia ada 12 sektor yaitu sektor perdagangan, industri kimia, industri pupuk dan pestisida, jasa lainnya, bangunan, industri mesin, alat alat dan perlengkapan listrik, industri makanan lainnya, angkutan darat, listrik, gas, dan air bersih, industri barang karet dan plastik, peternakan, industri kertas, barang dari kertas dan karton.¹ Perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan cukup pesat salah satunya adalah pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah seseorang yang berdagang dengan modal relatif kecil di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pedagang kaki lima memiliki peran signifikan dalam perekonomian lokal dan memberikan kontribusi penting dalam pengentasan kemiskinan pada dasarnya, keberadaan pedagang kaki lima merupakan cerminan dari keterbatasan lapangan

¹ Lismuba Indriani, Mohammad Abdul Mukhyt, *Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input-Output* (Bandung: Proceeding PESAT, 2013), 1.

kerja formal di Indonesia. Banyak individu yang memilih menjadi PKL sebagai alternatif mata pencaharian karena terbatasnya kesempatan untuk bekerja di sektor formal. PKL sering kali berasal dari kelompok ekonomi lemah dan memiliki keterampilan yang terbatas.² Melalui kegiatan dagang mereka, mereka dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Pedagang kaki lima di Pamekasan saat ini semakin pesat perkembangannya dan sudah banyak pedagang kaki lima yang sudah menguasai trotoar dan juga banyak yang berjualan di pinggir jalan yang tentunya sangat mengganggu dan tidak nyaman di pandang. Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memiliki program untuk menata kota Pamekasan ini agar cantik dan indah, bersih asri dan enak dipandang.³

Penelitian ini di latar belakang oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian tentang *Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar* oleh Anugrah Akbar, Muhammad Tahir , Nasrul Haq. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Keberhasilan relokasi ini sudah dikatakan berhasil dikarenakan PKL sudah memasuki gedung yang sudah disiapkan(New Makassar Mall), meskipun masih ada pedagang yang belum masuk dan masih menempati tempat sementara, namun pedagang masih dapat pindah ke dalam gedung ketika sudah siap, baik secara finansial atau apa pun itu meskipun tidak semua PKL memasuki gedung yang sudah disediakan dan masih menempati tempat sementara namun setidaknya para PKL tidak lagi mengganggu

² Choirul Anam, "Pedagang Kaki Lima Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan," diakses dari <https://ln.run/RuPdV>, pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 21.32 WIB

³ Pamekasan Hebat, "Baddrut Taman Jelaskan Penertiban PKL di Arek Lancor," di akses dari <https://pamekasanhebat.com/2018/12/06/baddrut-taman-jelaskan-penertiban-pkl-di-arek-lancor/>, pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 21.40 WIB.

fungsi jalan.⁴

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.⁵

Keberadaan PKL khususnya PKL ilegal sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan kerapian dalam Kota. Oleh karena itu harus ada pembinaan, pengarahan dan pemberdayaan PKL melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kota Metro agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pengelolaan daerah perkotaan memerlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh kota tersebut.⁶

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi kontroversi antara Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Pertamanan Kota, dikarenakan pedagang kaki lima mampu menarik pusat perputaran perdagangan dikawasan pusat Kota Metro dan mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kota Metro namun dilihat dari sisi lain kegiatan usaha pedagang kaki lima sangat mengganggu kenyamanan tempat umum, seperti trotoar (pinggir jalan), membuka lapak di pasar yang sudah ditertibkan sehingga menimbulkan permasalahan

⁴ Anugrah Akbar dkk, "Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makasar," *Journal Unismuh* 2, no. 4 (Agustus, 2021): 1410,

⁵ UIN Sunan Gunung Djati Bandung Universitas, 11

⁶ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 287.

ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan Kota Metro.⁷

Pedagang kaki lima merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anggota masyarakat yang berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas, Semakin ketatnya persaingan bisnis sehingga membuat pedagang kaki lima semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen, Sehingga pedagang perlu menciptakan ide ide baru terhadap dagangan yang mau di jualnya.

Pengaturan kegiatan usaha kaki lima melalui inpres mencerminkan bahwa sektor informal semakin diakui sebagai subsistem perekonomian nasional. Sektor yang kurang diperhatikan dan dianggap “*marginal*” ini ternyata bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, dan mendukung usaha pemberantasan kemiskinan di daerah perkotaan. Sektor informal termasuk usaha kaki lima memang perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan dirinya Tidak jarang sektor ini melahirkan wiraswasta-wiraswastayang tangguh, dinamis, dan bermental maju.⁸

Pedagang kaki lima yang ada di Jalan Bugih ini awalnya berjualan di pinggir jalan, tapi sekarang yang awalnya berjualan di pinggir jalan sekarang sudah di sediakan tempat khusus yang lebih rapi dan nyaman di pandang mata, tempat baru untuk pedagang kaki lima ini juga menuang pro dan kontra karna jika kita melihat kebiasaan orang Indonesia khususnya Pamekasan yakni orang yang tidak ingin ribet.

⁷ Eko Susanto, “Pemberdayaan Pedagang Kakil Lima Dinkota Metro” (Disertai, IAIN METRO, 2019), 3.

⁸ Endang Rostiana dkk, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera, 18.

Dengan dipindahkannya tempat Pedagang kaki lima ini diwajibkan masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya dan berjalan untuk mencari makanan yang mau di belinya tentunya ini adalah tantangan bagi orang yang malas dan tidak mau ribet, karna sebelum di pindah masyarakat tinggal memarkirkan kendaraan nya langsung di depan tempat penjual yang mau di belinya dan tentunya tidak di kenakan biaya parkir. Setelah kebijakan relokasi ini di realisasikan ternyata menimbulkan berbagai dampak yang tidak di harapkan yakni yang berkaitan dengan kenyamanan serta pendapatan para pedagang kaki lima lokasi yang baru dianggap kurang strategis, letak yang berada di area belakang dari lokasi yang sebelumnya mengakibatkan konsumen enggan untuk masuk kedalam tempat relokasi yang baru.

Persaingan antara pedagang kaki lima yang berjualan di tempat ini tentunya akan lebih sulit karna di pengaruhi dengan tempat jualan yang tidak berjejer lurus seperti sebelumnya, dan hal ini tentunya sangat merugikan bagi pedagang yang memiliki lapak jualan di paling belang karna sulit untuk di ketahui dan di lihat oleh para pembeli dan mayoritas makanan yang di jual di lapak pedagang kaki lima di jalan bugih kabupaten Pamekasan ini menu yang di jual itu sama seperti, nasi goreng, lalapan, sate, mie ayam, dan lain lain.⁹ Oleh sebab itu maka pedagang yang berjualan di sana harus memiliki ide atau hal hal baru untuk membuat dagangannya setidaknya ada sedikit berbeda dari pedagang yang lain dan hal ini yang bisa membuat pelanggan bisa tertarik untuk datang dan membeli dagangan yang kita jual.

⁹ Slamet, Pedagang Nasi Goreng, Wawancara Langsung (16 Oktober 2023)

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dimana pada Pasal 3 menyebutkan tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui lokasi sesuai dengan peruntukannya; penetapan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan beberapa paparan di atas dapat di gambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan baik dan maksimal kebijakan pemerintah kabupaten pamekasan, tentang pedagang kaki lima, karnanya penelitian ini perlu untuk di lakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **"Evektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan BugihKabupaten Pamekasan"**

B. Fokus Masalah

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan?

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pamekasan: Peraturan Pedia, 2021), 3.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya akan memberi kegunaan bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoris

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori teori di dalam ilmu administrasi Negara terutama menyangkut efektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama pada masa yang akan datang.

3. Secara Individual

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh Peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah di butuhkan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap makna dan arti yang di maksud dari beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut, sehingga terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini. Terdapat beberapa istilah yang di anggap perlu untuk di definisikan, diantaranya:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan. Sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.¹¹

2. Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.¹²

3. Relokasi

Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya musnah, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru.¹³

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah “*the people who offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and pavement*” yang berarti orang yang menawarkan barang atau jasa untuk di jual dari tempat-tempat umum, terutama

¹¹ Syifa Dewi Nurraeni, “Analysis of Promotion Effectivity Trough Social Instagram at PT. Niion Indonesia Utama in 2017,” *Jurnal e-Procceding of Applied Science* 3, no. 2 (Agustus, 2017), 3.

¹² Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Public Formalasi, Implemantasi dan Evaluasi Kebijakan Public* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvanlitera, 2015), 2.

¹³ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertahanan Antara Relugasi dan Implemetasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2001), 92.

jalan-jalan dan trotoar. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹⁴

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, ada beberapa penelitian tentang strategi pemasaran.

1. Casey Meilinda Sapulete, Welson Y. Rompas, Novie Palar.

Penelitian di lakukan pada tahun 2022, dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan memanfaatkan landasanteori yang akan dipakai sebagai pemandu, penelitian ini akan berfokus pada penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pasar 45.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari kebijakan relokasi PKL saat ini belum terlihat dampak positifnya bagi masyarakat Kota Manado. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa dilihat dari pelaksanaannya, proses relokasi tersebut kurang efektif dalam penataan PKL di kawasan Pasar 45. Kebijakan yang dilakukan ini

¹⁴ Rafidah, "Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipurah Kota Jambi)," *Ondonesian Journal of Islamic Economic and Business* 4, no. 2 (Desember: 2019), 29.

kurang efektif dan hasil output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan belum ada dampak positif bagi masyarakat kota Manado, Fokus penelitian ini fokus kepada ke efektif dalam penataan PKL di kawasan pasar 45.¹⁵

Persamaan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari penelitian ini Perbedaannya adalah dalam penelitian Casey Meilinda Sapulete, Welson Y. Rompas, Novie Palar. Objek kajiannya adalah mengevaluasi kembali kebijakan mengenai relokasi PKL di Kota Manado yang tidak sesuai, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah Efektivitas kebijakan relokasi PKL di jalan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan Efektivitas relokasi di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

2. Muhammad Jainuri, Hendra Sukmana

Penelitian ini di lakukan pada tahun 2022, dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Teknik penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Modifikasi Disperindag Sidoarjo. bagian pembinaan pedagang informal Disperindag Sidoarjo, koordinator PKL di sentra kuliner Gajah Mada, Satpol PP, di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan

¹⁵ Casey Meilinda, Sapule Welson Y. Rompas Palar, "Evaluasi Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Administasi Public* 8, no. 120 (2022), 6-7.

yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan.

Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. Faktor penghambat antara lain kurangnya perlindungan dan pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi yang belum memadai, fokus penelitian ini lebih fokus kepada sarana prasarana relokasi yang belum memadai.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya adalah dalam penelitian Muhammad Jaunuri Dan Hendra Sukmana objek kajiannya adalah mengevaluasi cakupan relokasi atau penempatan yang sesuai untuk PKL sehingga menempati lahan yang menjadi tata ruang kota yang terdiri dari relokasi yang di lakukan ke PKL di tengah Kuliner Gajah Mada, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah eektivitas kebijakan relokasi PKL di jalan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan Efektivitas relokasi di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

3. Wahyudi Puruhita

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Penataan Pkl di Kawasan Alun-Alun Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Perda nomor 6 tahun 2013, tentang penataan dan pemberdayaan

¹⁶ Muhammad Jainuri, Hendra Sukmana, "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no, 2 (2022), 107-115.

PKL telah berupaya untuk mengatur PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Namun demikian dari beberapa upaya kebijakan tersebut masih meninggalkan persoalan, dikarenakan belum optimalnya kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi. Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam mengidentifikasi karakteristik PKL dilakukan analisis statistik deskriptif.

Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif dalam melakukan kajian terhadap materi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan untuk menghasilkan indikator evaluasi kebijakan. Berdasarkan kajian terhadap materi kebijakan Penataan PKL telah memenuhi kriteria Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Namun demikian berdasarkan data-data pencapaiannya, kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria ketepatan. Untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah, yaitu berupa ketegasan dalam pendataan dan pengawasan terhadap PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL, dan penguatan kerjasama antar instansi lembaga pemerintah. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh para pedagang adalah berupa partisipasi aktif dan kesadaran dalam menjaga kawasan Alun-alun Ngawi, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan penataan PKL di Kawasan Alun-alun Ngawi. Fokus penelitian ini lebih ke Proses evaluasi penataan PKL tersebut berdasarkan kriteria evaluasi seperti Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan, karna kriteria-kriteria tersebut masih belum dapat terpenuhi secara optimal, kecuali untuk kriteria

ketepatan.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian wahyudhi puruhita Objek kajiannya adalah mengevaluasi kebijakan penataan PKL di kawasan alun-alun ngawi dan menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi dan berbagai situasi atau berbagai aktivitas yang timbul di kawasan alun- alun ngawi sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah eektivitas kebijakan relokasi PKL di jalan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan Efektivitas relokasi PKL di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

4. Esa Septian

Penelitian ini di lakukan pada tahun 2022, dengan judul penelitian, Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan alternatif solusi dalam konflik kebijakan relokasi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro dengan Pemerintah Daerah. Teori transformasi konflik digunakan untuk problem-solving sebagai langkah membangun hubungan yang baik secara jangka panjang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Pengumpulan data diperoleh dari literatur yang relevan dengan tema penelitian, yaitu menggunakan teknik content analysis. Langkah-langkah analisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

¹⁷ Wahyudi Puruhita, "Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-ALun Ngawi," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 11, no. 2 (Juli, 2015): 242-259.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa relokasi kebijakan PKL dapat mendatangkan nilai positif bagi keberlanjutan Kawasan Malioboro sebagai warisan budaya dunia. Upaya mensukseskan kebijakan relokasi PKL dapat dilihat dari perspektif teoritransformasi konflik, yaitu a) Perubahan personal PKL dalam peningkatan kapasitas diri; b) Perubahan relasional yang konstruktif antara pemerintah dengan PKL; c) Perubahan struktural dalam memfasilitasi peningkatan usaha PKL; dan d)Perubahan kultural dalam membangun sumber daya dan mekanisme relokasi PKL Malioboro. PKL Malioboro menggunakan berbagai bentuk bangunan usaha yang didirikan, yaitu warung semi permanen. Meja yang disusun dari kayu panjang, gerobak, dan alas tikar menjadi sarana berdagang PKL Malioboro. Adanya kebijakan relokasi, pemerintah harus memperhatikan kesiapan sarana daninfrastruktur yang memadai agar tempat yang baru dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kebijakan relokasi di sisi lain sebagai jalan tempuh dengan menjadikanKawasan lepas dari persoalan kemacetan yang berada di sepanjang KawasanMalioboro, fokus penelitian ini lebih fokus Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan alternatif solusi dalam konflik kebijakan relokasi antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro dengan Pemerintah Daerah.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian Esa Septian objek kajiannya adalah menawarkan alternatif solusi dalam konflik kebijakan relokasi antara pedagang kaki lima (PKL) Malioboro

¹⁸ Esa Septian, “Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”, *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 3 (Desember, 2022): 327.

dengan pemerintah Daerah sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah eektivitas kebijakan relokasi PKL di jalan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan Efektivitas relokasi PKL di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

5. Ferizaldi

Penelitian ini di lakukan pada tahun 2022, dengan judul penelitian Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe, Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui, Observasi, Wawancara dan, Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2005:5), dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu Data Koleksi, Reduksi Data, penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Berdasarkan penelitian lapangan didapatkan fakta bahwa Keberadaan Pedagang K5 di kawasan jalan Protokol kota Lhokseumawe semakin banyak dan sangat mengganggu pengguna jalan, Trotoar sebagai salah satu ruang publik fungsinya sudah terdegradasikan, disisi lain kebijakan yang sudah dikeluarkan dinilai belum efektif, dengan merelokasi pedagang K5 ke pasar Pusong Baru sampai kepada pembangunan pusat jajanan baru. Disamping itu timbul permasalahan lain yaitu bertambahnya volume sampah dan hilangnya kerapian kota pada malam hari, penelitian ini fokus kepada kebijakan yang sudah dikeluarkan namun dinilai belum efektif.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama Menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan

¹⁹ Ferizaldi, "Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe," *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 8, no. 2. (Oktober, 2022): 69-78.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Ferizaldi objek kajiannya adalah merelokasi PKL ke kawasan KP3 yang merupakan eks pelabuhan laut lhokseumawe lama dan bersisian dengan kawasan dengan pasar Busong Paro, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah eektivitas kebijakan relokasi PKL di jalan Bugih, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan Efektivitas relokasi di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.